



Optimalisasi Peran Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali Dalam Meningkatkan Citra Positif

Ni Kadek Ayu Putri Saraswati *

Ni Putu Anik Prabawati **

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Correspondence: * kadekayuputri77@gmail.com , ** prabawati@unud.ac.id

Abstract

The Legal Information and Public Relations Division (Penkum) of the Bali High Prosecutor's Office holds a strategic role in building the institution's positive image in the eyes of the public through the optimization of digital media. This study aims to examine the role of Penkum in increasing public trust through the utilization of the official website and social media channels of the Bali High Prosecutor's Office. This paper employs a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the public communication strategies implemented align with the Public Relations indicators proposed by Kotler and Keller (2016), such as publications, events, sponsorships, and publicity. Programs like Jaksa Masuk Sekolah (Prosecutors Go to School), Jaksa Masuk Desa (Prosecutors Go to Villages), Jaga Desa (Guard the Village), and Jaksa Menyapa (Prosecutors Greet the Public) serve as effective tools for engaging directly with the community. In addition, digital media such as the website and social media are used as responsive and adaptive legal information channels that meet public needs. The recommendations include improving human resource capacity in digital media management, developing more creative and educational content, and expanding collaboration with educational institutions and local communities.

Keywords: *Public Relations, Legal Information, Bali High Prosecutor's Office*

Abstrak

Divisi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi Bali memiliki peran strategis dalam membangun citra positif institusi di mata publik melalui optimalisasi media digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penkum dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui pemanfaatan website dan kanal media sosial resmi Kejati Bali. Penulisan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang diterapkan sejalan dengan indikator *Public Relations* menurut Kotler dan Keller (2016), seperti publikasi, event, sponsorship, dan pemberitaan. Program seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Desa, Jaga Desa, dan Jaksa Menyapa menjadi sarana efektif dalam mendekatkan institusi kepada masyarakat. Selain itu, media digital seperti website dan media sosial dimanfaatkan sebagai kanal informasi hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan media digital, pengembangan konten yang kreatif dan edukatif, serta perluasan kerja sama dengan instansi pendidikan dan komunitas lokal.

Kata kunci: *Public Relations, Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Bali*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh dan menilai informasi, termasuk informasi mengenai kinerja lembaga pemerintahan. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga negara pun semakin tinggi (Effendy, 2015). Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas di bidang penegakan hukum turut menjadi sorotan publik, baik dalam keberhasilannya menegakkan hukum maupun dalam membangun citra institusional di mata masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Bali, sebagai instansi vertikal Kejaksaan Agung Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali, memegang peranan penting dalam menjaga wibawa dan citra Kejaksaan di tingkat daerah. Dengan tugas utama melaksanakan tugas penuntutan, pra-penuntutan, eksekusi perkara pidana, serta tugas-tugas lain

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Kejaksaan Tinggi Bali juga dituntut untuk mampu menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat luas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam upaya membangun citra positif, Divisi Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejaksaan Tinggi Bali memainkan peranan strategis (Sandiyudha, 2019).

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap akses informasi dari lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. Di satu sisi, Kejaksaan Tinggi Bali sebagai institusi penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, khususnya melalui fungsi Penerangan Hukum (Penkum). Namun di sisi lain, terdapat batasan-batasan informasi yang secara hukum tidak dapat disampaikan kepada publik karena berkaitan dengan kerahasiaan proses hukum, perlindungan data, dan kepentingan penyidikan.

Permasalahan yang kerap muncul bukanlah pada ketersediaan informasi, melainkan pada pemahaman masyarakat terhadap jenis informasi yang dapat diakses. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menuntut agar seluruh informasi dapat diberikan secara langsung dan instan, tanpa memahami bahwa terdapat prosedur, analisis, dan tahapan hukum yang harus dilalui sebelum suatu laporan menghasilkan kesimpulan. Bahkan ketika telah dijelaskan bahwa beberapa informasi tidak bisa dibagikan karena alasan hukum, sebagian masyarakat tetap bersikukuh untuk memperoleh informasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyampaian informasi hukum (Kejaksaan Tinggi Bali, 2025).

Kendala lain yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Bali melalui program Penerangan Hukum adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh hasil secara cepat ketika melaporkan suatu peristiwa hukum. Padahal dalam sistem penegakan hukum, setiap laporan memerlukan proses tindak lanjut, analisa mendalam, dan pertimbangan hukum sebelum dapat disimpulkan. Tuntutan terhadap hasil yang cepat dan instan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan dalam menjaga citra positif di mata masyarakat.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, kegiatan *public relations* kini dapat dilaksanakan secara daring melalui berbagai platform digital, salah satunya adalah website resmi institusi. Humas Kejaksaan Tinggi Bali merupakan salah satu contoh implementasi pemanfaatan teknologi ini dalam menjalankan fungsi kehumasan. Di era digital saat ini, unit humas dituntut untuk menyajikan informasi yang cepat, akurat, lengkap, dan selalu diperbarui. Oleh karena itu, keberadaan website menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung upaya humas untuk membangun dan mengembalikan citra positif lembaga di mata publik.

Pemanfaatan website sebagai media komunikasi publik memiliki sejumlah keunggulan strategis. Menurut Kriyantono (2014), media digital seperti website memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, menjangkau audiens yang lebih luas, serta memberikan akses yang transparan kepada masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan kinerja institusi. melalui platform ini, Kejaksaan Tinggi Bali dapat membentuk persepsi publik yang positif, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi sebagai institusi penegak hukum yang bersih, profesional, dan akuntabel. Berikut merupakan tampilan website Kejaksaan Tinggi Bali.

Gambar 1. Kanal Website Kejati Bali



Sumber: Website Kejaksaan Tinggi Bali (<https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/>)

Namun demikian, optimalisasi website sebagai media strategis pencitraan memerlukan perencanaan komunikasi yang matang dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, Divisi Penkum dan Humas perlu memastikan bahwa konten yang disajikan melalui website selalu akurat, relevan, *up-to-date*, dan mampu membangun interaksi dua arah dengan masyarakat (Cutlip, Center & Broom, 2011). Oleh karena itu, optimalisasi peran Penerangan Hukum (Penkum) menjadi sangat penting sebagai jembatan antara Kejaksaan dan masyarakat. Penkum memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi hukum secara benar, edukatif, dan proporsional, sekaligus membangun pemahaman publik mengenai batasan informasi hukum yang dapat diakses. Melalui pendekatan komunikasi yang efektif, transparan, dan beretika, diharapkan Kejaksaan Tinggi Bali mampu meningkatkan citra positif institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.

Public Relations merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertugas mengevaluasi pandangan masyarakat, mengenali kebijakan serta prosedur organisasi demi kepentingan publik, dan merancang program komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta dukungan dari publik. Praktisi humas memegang peran penting dalam organisasi sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat, dengan tujuan membangun hubungan yang saling memahami atau mutual understanding (Ruslan, 2010).

Kotler & Keller (2016) mendefinisikan *Public Relations* sebagai program yang bertujuan mempromosikan dan menjaga citra perusahaan serta produknya. Menurut Denny Griswold, seperti dikutip oleh Danandjaja (2011), *Public Relations* merupakan salah satu fungsi manajerial yang memiliki tanggung jawab untuk menilai opini publik, merumuskan kebijakan dan langkah yang sesuai bagi individu atau organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, serta merancang dan menjalankan strategi agar tercipta pemahaman dan penerimaan dari publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali dalam upaya meningkatkan citra positif institusi di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi serta pelayanan hukum yang cepat dan transparan. Fokus kajian diarahkan pada pemanfaatan website resmi sebagai media utama komunikasi publik yang merepresentasikan komitmen lembaga terhadap transparansi dan akuntabilitas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan efektivitas strategi komunikasi institusional Kejaksaan Tinggi Bali guna membangun kepercayaan publik serta mewujudkan citra kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam strategi komunikasi Divisi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali dalam membangun citra positif institusi melalui media website resmi. Penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam kepada pejabat Penkum dan Humas, serta observasi langsung terhadap aktivitas komunikasi publik, sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip digital, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi data kepada narasumber (*member checking*) untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

III. Hasil dan Pembahasan

Penerangan Hukum (Penkum) di Kejaksaan Tinggi Bali memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara institusi kejaksaan dengan masyarakat luas. Penkum bertugas menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu mengenai berbagai kegiatan, kebijakan, serta penanganan kasus hukum yang menjadi perhatian publik. Melalui fungsi ini, Penkum berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta menjaga citra positif Kejaksaan Tinggi Bali. Optimalisasi

peran Penkum menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dalam era keterbukaan informasi dan ekspektasi tinggi publik terhadap transparansi serta profesionalisme institusi hukum.

Berdasarkan teori *Public Relations* yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2016), terdapat empat indikator utama dalam menjalankan fungsi kehumasan secara optimal, yakni publikasi, event, sponsorship, dan pemberitaan. Keempat elemen ini menjadi fondasi strategis dalam membentuk citra positif lembaga, khususnya lembaga pemerintah seperti Kejaksaan Tinggi Bali, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kredibilitas sebagai institusi penegak hukum. Dalam konteks ini, Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali berupaya mengimplementasikan keempat indikator tersebut secara sinergis dan terarah untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi serta pelayanan hukum yang cepat dan profesional. Hasil wawancara dengan Bapak Eka Sabana Putra, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali dan Kakak Putu Bagus Kresna Putrawan, S.Kom selaku Analisis Sistem Informasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali menunjukkan bahwa strategi kehumasan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat strategis dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

A. Indikator Publikasi

Indikator publikasi, menjadi aspek paling fundamental dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Bali secara aktif memanfaatkan teknologi informasi, khususnya melalui website resmi dan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter sebagai kanal komunikasi publik. Menurut Bapak Eka, *“Setiap kali kami turun ke sekolah, desa, atau kampus, kami selalu memperkenalkan akun media sosial resmi Kejati Bali. Tujuannya bukan sekadar promosi, tapi agar masyarakat punya akses yang benar terhadap informasi dari Kejaksaan”*. Kanal digital ini juga memudahkan humas Kejaksaan dalam melakukan publikasi secara real-time, sehingga mampu mengimbangi arus informasi yang sangat cepat dan terkadang tidak akurat di media sosial. Dengan demikian, publikasi yang terstruktur melalui media digital menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Tabel 1. Data Akun Resmi Website dan Media Sosial Kejaksaan Tinggi Bali

NO	DATA AKUN	NAMA AKUN
1.	WEBSITE	kejati-bali.go.id
2.	TWITTER	@kejati_bali
3.	INSTAGRAM	@kejaksaan_tinggi_bali
4.	YOUTUBE	KEJAKSAAN TINGGI BALI
5.	FACEBOOK	Kejaksaan Tinggi Bali

Sumber: Kejaksaan Tinggi Bali (2025)

Gambar ini menyajikan informasi mengenai akun resmi digital milik Kejaksaan Tinggi Bali yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik. Akun-akun tersebut meliputi website resmi di alamat kejati-bali.go.id, serta berbagai platform media sosial seperti Twitter (@kejati_bali), Instagram (@kejaksaan_tinggi_bali), YouTube (KEJAKSAAN TINGGI BALI), dan Facebook (Kejaksaan Tinggi Bali). Keberadaan akun-akun ini mencerminkan upaya Kejati Bali dalam meningkatkan transparansi, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta mendukung peran Penerangan Hukum (Penkum) dalam membentuk citra positif institusi melalui kanal digital yang mudah diakses publik.

Selaras dengan hal tersebut, Kakak Kresna selaku staf Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali menekankan bahwa publikasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja institusi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ia menyatakan, *“Publikasi penting tidak hanya untuk menyampaikan kinerja pimpinan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat serta sebagai sarana edukasi dan pengawasan”*. Selain menyampaikan informasi terkait pelayanan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat, publikasi juga dinilai berdampak luas dalam membangun kesadaran hukum serta membantu Kejaksaan bersikap lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di Masyarakat. Dengan demikian, publikasi yang dilakukan secara aktif dan strategis berperan besar dalam membangun citra positif Kejaksaan Tinggi Bali sebagai lembaga yang terbuka, peduli, dan akuntabel.

Tabel 2. Tabel Rekapitulasi Laporan Kegiatan Media Sosial Kejati Bali – April 2025

Media Sosial	Jumlah Postingan	Jumlah Followers
Twitter	33	226
Instagram	33	8.414
YouTube	0	1.520
Facebook	33	2.000

Sumber: Kejaksaan Tinggi Bali (2025)

Berdasarkan data rekapitulasi laporan kegiatan media sosial Kejati Bali periode April 2025, tercatat bahwa jumlah unggahan pada Twitter, Instagram, dan Facebook masing-masing sebanyak 33 kali, sedangkan YouTube tidak memiliki unggahan pada bulan tersebut. Dari sisi jangkauan audiens, jumlah pengikut terbanyak berada di Instagram sebanyak 8.414 followers, diikuti oleh Facebook sebanyak 2.000, YouTube 1.520, dan Twitter 226. Data ini menunjukkan bahwa Kejati Bali telah aktif mengkomunikasikan berbagai informasi hukum kepada masyarakat secara konsisten melalui media sosial, yang merupakan bentuk nyata penerapan indikator publikasi. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat citra positif institusi di era digital.

B. Indikator Event

Indikator event direalisasikan melalui berbagai kegiatan langsung yang bersifat edukatif dan partisipatif seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Desa, dan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA). Program-program ini memiliki segmentasi target yang berbeda-beda, namun seluruhnya diarahkan untuk mendekatkan institusi Kejaksaan dengan masyarakat. Menurut Bapak Eka, *“Program Jaksa Menyapa sangat efektif karena dilakukan melalui siaran radio, jadi yang mendengar bisa siapa saja anak muda, orang tua, masyarakat umum. Sementara kalau Jaksa Masuk Sekolah, itu memang khusus menyasar generasi muda di lingkungan sekolah atau kampus. Untuk Jaksa Masuk Desa, kami berhadapan langsung dengan perangkat desa, masyarakat adat, bahkan tokoh masyarakat setempat,”* jelasnya. Dalam setiap kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menerima materi hukum, tetapi juga mendapatkan ruang untuk berdialog langsung dengan jaksa, menyampaikan pertanyaan, dan mengutarakan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan emosional dan kepercayaan yang lebih kuat antara institusi dan publik, sekaligus mematahkan stigma bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang tertutup atau hanya hadir saat ada penindakan hukum. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Jaksa Menyapa di RRI Denpasar pada tanggal 20 Mei 2025.

Gambar 2. Kegiatan Jaksa Menyapa di RRI Denpasar



Sumber: Dokumen Pribadi

C. Indikator Sponsorship

Indikator sponsorship, meskipun secara teknis Kejaksaan tidak bertindak sebagai sponsor dalam bentuk pendanaan sebagaimana lembaga bisnis, tetapi dapat diinterpretasikan dalam bentuk dukungan institusional terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan. Bentuk partisipasi ini merupakan wujud kepedulian lembaga terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. Selain memperkuat peran Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum, kegiatan ini juga menambah nilai positif institusi di mata publik karena menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Sebagai bentuk dukungan yang seiring dengan upaya tersebut, Kakak Kresna yang merupakan staf Penerangan Hukum Kejati Bali menyampaikan bahwa strategi sponsorship yang diterapkan oleh Kejaksaan cenderung bersifat koordinatif dan berorientasi institusional. Ia menjelaskan, *“Kalau sponsorship sifatnya lebih terpusat di Kejaksaan Agung, tapi Kejati maupun Kejari sering mendukung kegiatan di daerah, seperti event lari atau layanan publik yang bekerja sama dengan komunitas.”* Sebagai contoh, Kejari Klungkung mendukung kegiatan *city run*, sementara Kejati Bali menyediakan fasilitas SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di depan kantor sebagai layanan untuk masyarakat. Bentuk dukungan ini mencerminkan komitmen Kejaksaan daengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat komersial, strategi sponsorship semacam ini memiliki peran signifikan dalam membangun citra positif Kejaksaan sebagai lembaga yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan publik.

D. Indikator Pemberitaan

Indikator pemberitaan, yaitu penyebaran informasi institusi dalam bentuk berita melalui media massa. Dalam praktiknya, Kejaksaan Tinggi Bali secara konsisten menjalin kerja sama dengan berbagai media untuk mempublikasikan informasi terkait kegiatan institusional, penanganan perkara hukum, serta partisipasi Kejati dalam berbagai kegiatan nasional maupun daerah. *“Kami tidak membatasi media. Selama itu informasi yang bisa dibuka untuk publik, kami terbuka untuk diliput oleh media mana pun. Tujuannya adalah transparansi, supaya masyarakat tahu apa saja yang sudah dan sedang kami kerjakan,”* ujar Bapak Eka.

Gambar 3. Pemberitaan Jaksa Garda Desa



Sumber: Website Kejati Bali <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/index/15>

Gambar 4 menunjukkan dokumentasi kegiatan Penerangan Hukum Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 April 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan Direktorat II Kejaksaan Agung, Agus Riyanto, S.H., bersama tim dari Kejaksaan Agung dan perwakilan Kejati Bali. Informasi ini dipublikasikan secara resmi melalui website Kejati Bali sebagai bentuk pemberitaan yang bertujuan untuk menyampaikan kegiatan edukatif hukum kepada masyarakat dan membangun citra positif institusi kejaksaan.

Sedangkan Kakak Kresna, staf Penerangan Hukum Kejati Bali, menegaskan bahwa setiap pemberitaan yang disampaikan kepada publik harus memuat informasi yang jelas dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa, *“Pemberitaan yang berkualitas adalah yang mampu mencerminkan aspirasi masyarakat. Contohnya, ketika Kejati Bali mempublikasikan berita terkait penangkapan, masyarakat merasa puas karena melihat kinerja nyata lembaga. Sebaliknya, jika aktivitas jarang dipublikasikan, masyarakat bisa menilai bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan.”* Oleh karena itu, menurutnya peran Penkum sangat penting dalam menjaga citra institusi dengan menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena seluruh kegiatan Kejati bertujuan untuk melayani kepentingan publik. Dengan cara ini, pemberitaan berperan vital dalam membangun kepercayaan serta menarik perhatian masyarakat terhadap peran strategis Kejaksaan.

Secara keseluruhan, keempat indikator *Public Relations* yang diterapkan oleh Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali telah menunjukkan optimalisasi dalam meningkatkan citra positif lembaga, meskipun tantangan tetap ada terutama dalam menghadapi ekspektasi masyarakat terhadap informasi yang tidak semuanya bisa dibuka karena alasan hukum dan etika. Namun, melalui strategi komunikasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, dan pendekatan humanis melalui kegiatan langsung di masyarakat,

Kejaksaan Tinggi Bali berhasil memperkuat legitimasi sebagai lembaga hukum yang transparan, partisipatif, dan terpercaya. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran Penkum bukan hanya soal penyebaran informasi, tetapi juga tentang membangun komunikasi dua arah yang saling memahami antara institusi dan masyarakat.

Optimalisasi peran Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali tidak hanya berdampak pada peningkatan komunikasi publik secara jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Kepercayaan publik merupakan aset penting yang menentukan sejauh mana lembaga publik dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Bapak Eka Sabana Putra menegaskan bahwa, *"Kepercayaan publik itu sangat penting karena Kejaksaan adalah institusi yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan publik, terutama dalam hal hukum kepada masyarakat."* Ia menambahkan bahwa apabila proses birokrasi dalam menanggapi pengaduan dan konsultasi hukum dilakukan secara efektif dan responsif, maka masyarakat akan merasa lebih nyaman dan percaya terhadap lembaga kejaksaan. Bahkan, menurutnya, *"Masyarakat itu kan kadang takut bertanya kepada pengacara karena harus bayar, tetapi kalau mereka datang ke kantor Kejaksaan dan mendapatkan jawaban yang tepat, itu akan membuat mereka kembali lagi dan mempercayakan permasalahan hukumnya kepada kami."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan Penkum sebagai jembatan komunikasi hukum berperan vital dalam memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat serta bagian dari sistem pelayanan publik yang proaktif, humanis, dan solutif.

Selain dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik, wawancara ini juga mengungkapkan harapan pengembangan kelembagaan Penkum ke depan, khususnya dalam konteks penguatan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, Bapak Eka menyatakan bahwa keberhasilan Penkum sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi personelnnya, terutama dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan public speaking. Ia menekankan, *"Harapan kami ke depan adalah tersedianya tenaga-tenaga muda yang punya passion di IT, komunikasi, dan public speaking, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa tersampaikan dan disambungkan ke pejabat yang berwenang."* Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Penkum ke depan tidak hanya membutuhkan aparatur hukum yang memahami substansi regulasi, tetapi juga profesional yang mampu menerjemahkan aspirasi publik ke dalam bentuk komunikasi yang jelas, strategis, dan berdampak. Dengan demikian, Penkum dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi komunikasi publik serta mampu mengelola dinamika informasi secara cepat dan tepat.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali telah dilakukan secara optimal dengan mengacu pada empat indikator utama *Public Relations* menurut Kotler dan Keller (2016), yaitu publikasi, event, sponsorship, dan pemberitaan. Keempat indikator ini diimplementasikan secara sinergis guna membangun citra lembaga yang transparan, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.

Pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial menjadi kunci dalam penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Kegiatan langsung seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, Jaga Desa dan Jaksa Masuk Desa menjadi sarana edukasi hukum yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dukungan terhadap kegiatan masyarakat juga menunjukkan keberpihakan institusi terhadap pemberdayaan publik, sementara keterbukaan terhadap media menjadikan pemberitaan sebagai sarana strategis dalam membentuk opini publik yang positif. Optimalisasi peran Penkum tidak hanya memperkuat komunikasi jangka pendek, tetapi juga membangun kepercayaan publik jangka panjang yang sangat penting bagi legitimasi lembaga hukum. Keberhasilan ini bergantung pada kualitas sumber daya manusia, strategi komunikasi yang adaptif, serta keterbukaan terhadap perkembangan teknologi informasi.

Untuk meningkatkan peran Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali dalam membangun citra positif, penulis menyarankan agar peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas, khususnya dalam bidang pelayanan publik, teknologi informasi, dan *public speaking*. Pengembangan konten publikasi digital yang kreatif, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat juga penting dilakukan guna memperluas jangkauan informasi hukum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup institusi

yang masih terbatas pada Kejaksaan Tinggi Bali, sehingga diharapkan penelitian lanjutan dapat memperluas objek dan memperdalam analisis pada aspek komunikasi kelembagaan secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Budiman, O. X. J. S. 2020. *Pengemasan Informasi Pada Konten Instagram @Isprjakarta dalam Mengomunikasikan Pesan (Studi Kualitatif Konten Instagram @ Isprjakarta Periode Maret-Mei 2020)*. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Cutlip, Scott M., Center, Allen H., & Broom, Glen M. 2011. *Effective Public Relations* (9th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Danandjaja. 2011. *Peranan Humas dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Effendy, Onong Uchjana. 2015. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Heath, R. L. 2013. *Encyclopedia of Public Relations (J. Brace-Thompson, C. Maurer, T. Buyan, D. Dimura, & J. Ford (eds.); 2nd Editio)*. SAGE Publications, Inc.
- Ishaq, R. E. 2017. *Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: Intrans Publishing.
- Kejaksaan Tinggi Bali. 2025. *Website Resmi Kejaksaan Tinggi Bali*. Diakses dari: <https://kejati-bali.go.id>
- Kirana Ambarwati. 2009. *Peran Dan Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga).
- Kriyantono, Rachmad. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kotler, & Keller. 2016. *Marketing Management (Vol. 15e)*. Pearson Education Inc.
- Maulana, A., & Mulyana, M. 2020. Jurnal. Analisis Pengaruh Public Relation dan Sales Promotion Terhadap Minat Beli pada Produk Starbucks di Kota Bogor.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sandiudha, T. K. 2019. *Peran Divisi Penkum dan humas kejaksaan tinggi jawa tengah dalam membangun citra melalui website* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Tjiptono, Fandy. 2012. *Pemasaran Jasa*. Jogjakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.